



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 900/ *116* /RSUD-2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN NOMOR : 900/16/RSUD-2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kegiatan Pada Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan, perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Nomor : 900/16/RSUD-2021 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

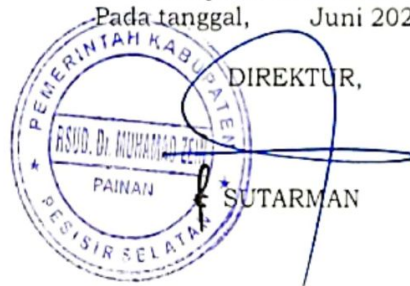
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan di lingkungan Instansi Pemerintah serta perubahannya;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/66/Kpts/BPT-PS/2021 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhamamd Zein Painan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Nomor : 900/16/RSUD-2021 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad zein Painan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, Juni 2021



Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Pimpinan Kegiatan yang bersangkutan.
4. Peninggal.

LAMPIRAN

NOMOR

: 900/ 116 / RSUD 2021

TANGGAL

: Juni 2021

TENTANG

: PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN FAHAN NOMOR : 900/16/RSUD 2021 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN FAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN RBA YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1.	FEFRIANTO, S.Kom, M.Si Nip. 19860212 201101 1 014	Kasubag. Umum Kepegawaian dan Diklat	PPTK	1. Pengadaan Cetak Rekam Medik 2. Pengadaan Mobiler 3. Pengadaan Linen dan Bahan Tenun Lainnya 4. Pengadaan Interior Ruangan 5. Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Ambulance 6. Pemeliharaan Mobiler 7. Belanja Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan 9. Penyediaan Bahan Kearsipan dan Kepustakaan 10. Belanja Telepon, Air dan Listrik 11. Pengadaan Bahan Bacaan Surat Kabar Koran 12. Penyediaan Materai dan Perangko
2.	FEFNI KALDIAN, S.Psi, M.Ikom Nip. 19851011 200902 2 003	Kasubag Perencanaan Dan Pelaporan	PPTK	1. Pengadaan Bahan Makan Pasien 2. Belanja Makan dan Minum Petugas Jaga pada Bulan Ramadhan 3. Pengadaan Bahan Isi Tabung Gas 4. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dapur 6. Pengadaan Makan Rapat / Tamu 7. Penunjang Perencanaan dan Penganggaran RSUD
3.	AFWAN, SKM NIP. 19690511 1993031003	Ka. Instalasi IRLRS	PPTK	1. Pemeliharaan Gedung Pelayanan 2. Pengadaan Tempat Ibadah 3. Pemeliharaan rumah dinas 4. Pengadaan jasa kebersihan kantor
4.	DEWI MASTURA AGRA, SKM Nip. 19850421 200902 2 012	Penyusunan program anggaran dan pelaporan	PPTK	1. Penyelenggaraan Perjalanan Dinas 2. Penunjang Operasional Dewan Pengawas
5.	MEILIA EKA SYOFIANI, SKM NIP. 19850504 201101 1 021	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	PPTK	1. Penyediaan Jasa Non PNS dan Tambahan Penghasilan Non PNS 2. Pengelolaan Keuangan BLUD

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN RBA YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
6.	HIFRIZAL HARFEN, S. Kom Nip. 197007152010011004	Ka. Instalasi IT	PPTK	1. Pengadaan komputer dan Peralatannya 2. Pemeliharaan komputer dan Perangkat 3. Penediaan Biaya Sewa Rumah Diras/Gudang/Tenda
7.	SISKA FITRIANI MAHYUZA, SKM Nip. 19880525 201001 2 018	Staf IPIRS	PPTK	1. Pengadaan Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan 2. Pemeliharaan Lingkungan Rumah Sakit
8.	Ns. ADEK IMELDA SYAM, S.Kep.MAP Nip. 19770807 200212 2 003	Kasi Keperawatan	PPTK	1. Partisipasi Perlombaan 2. Pengiriman Diklat Petugas Medis, Paramedis, Penunjang Lainnya dan Struktural 3. Survei Kepuasan Pasien 4. Evaluasi Akreditasi
9.	Ns. ZAIYAR EFRITA, S.Kep.M.Kep Nip. 19710221 199503 2 001	Kasi Pelayanan	PPTK	1. Jasa Pihak Ketiga 2. Penunjang UTDRS
10.	RIRI LOVITA, S.SiT Nip. 19800106 200312 2 002	Staf Pelayanan	PPTK	1. Penyediaan Pelayanan Ambulance Rujukan 2. Penyediaan Jasa Dokter, Perawat, Petugas Jaga Sore Malam dan Dokter Referral
11.	HENNY DEVITA, Amd.Fis Nip. 197608172009022007	Staf PKRS	PPTK	1. Pengadaan Media Promosi dan Penanganan Keluhan Pelanggan 2. Partisipasi Pameran 3. Penunjang Penanggulangan Bencana dan Pemulasaran Jenazah
12.	YENITA FIBRIENY, S.Kep Nip. 196610071992032003	Staf Kasi Penunjang	PPTK	1. Belanja Jasa Pelayanan
13.	BAY EVON KARMILA, S.SiT. MM Nip. 19740815 200501 2 010	Kasi Penunjang Teknis	PPTK	1. Pengadaan obat-obatan
14.	NURHAINI, Amd.KL Nip. 19651231 198901 2 013	Kepala Seksi Peralatan	PPTK	1. Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga dan alat kantor lainnya 2. Pengadaan alat kesehatan dan alat peraga kesehatan 3. Pengadaan peralatan kantor
15.	ZETKI MILARINO, A.Md.TEM Nip. 19850711 201101 1 009	Teknisi Elektromedis	PPTK	1. Pengadaan reagensia dan peralatan labor

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN RBA YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
16	BERMAN SAGALA, AMTE Nip. 19820716 200902 2 005	Kepala IPSRS	PPTK	1. Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi 2. Penyediaan komponen Instalasi listrik dan komponen alat penerangan 3. Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik dan Jaringan Lainnya
17	YULIA RAHMI DASRUL, S Farm, Apt NIP. 19840711 200804 2 001	Apoteker Madya	PPTK	1. Pengadaan BMHP

